

ISSN 1907 - 5502

AdministratUr **JURNAL**

Vol. 3 NO.2 Agustus 2010

Dadi J. Iskandar

Pentingnya Membangun Iklim Komunikasi Organisasi
dalam Birokrasi Pemerintah

Kurhayadi

Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik

Toni Heryadi

Analisis Wacana Pidato Politik
Susilo Bambang Yudhoyono
Sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2009-2014

H. Sofyan Usman

Pemecahan Masalah Melalui Pendekatan Sistem
dalam Masalah Menurunnya Minat Masuk
Ke Perguruan Tinggi (Universitas)

Harjoko Sangganagara

Pancasila di Tengah Globalisasi

Adm.

Vol.3

No. 2

Hal. 1 - 78

Bandung, Agustus 2010

ISSN 1907 - 5502

AdministratUr

JURNAL

ISSN 1907 - 5502

Vol. 3 NO.2 Agustus 2010

Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)
STIA Bagasasi

Pelindung

H. Djoemad Tjiptowardojo
(Ketua STIA Bagasasi)

Penanggung jawab

Dadi J. Iskandar
(Ketua LPPM)

Ketua Penyunting

Silahudin

Penyunting

Dadi J. Iskandar
Cecep Pujawirawan
Silahudin
Bambang Soelistiyono
Rudy Supangkat

Layout

Adhy M. Nuur

Tata Usaha dan Sirkulasi

Moch. Idris
Ahis Mukti Ali
Anwar
Musolini
Pauji Saleh

Alamat

Kampus STIA Bagasasi
Jln. Cukang Jati No. 5 Gatot Subroto Bandung 40273
Telp/ 022-7306538 Fax. 022-7331036

E-Mail

jurnal_adm_stiabgs@yahoo.com

Jurnal *Administratur* terbit tiga kali dalam satu tahun, yang fokus kajian diarahkan pada masalah-masalah Administrasi Publik dan Politik (kontem-porer/ klasik), baik berbentuk essay dan atau hasil penelitian. Penyunting, menerima tulisan dari berbagai kalangan yang belum pernah diterbitkan, di-ketik dalam spasi rangkap, panjangnya antara 10-20 halamanA4

Administratur

JURNAL

Vol. 3 NO.2 Agustus 2010

Pengantar I ii
Daftar Isi I iv

Dadi J. Iskandar

Pentingnya Membangun Iklim Komunikasi Organisasi
dalam Birokrasi Pemerintah I 1 - 23

Harjoko Sangganagara

Pancasila di Tengah Globalisasi I 24-39

Kurhayadi

Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik I 40-50

Sofyan Usman

Pemecahan Masalah Melalui Pendekatan Sistem
dalam Masalah Menurunnya Minat Masuk
Ke Perguruan Tinggi (Universitas) I 51-58

Toni Heryadi

Analisis Wacana Pidato Politik
Susilo Bambang Yudhoyono

Pancasila di Tengah Globalisasi

oleh

Harjoko Sangganagara
Staf Pengajar STIA Bagasasi

Abstrak

SMasalah globalisasi bukan melulu eksploitasi kerusakan lingkungan, tetapi juga proses dehumanisasi. Globalisasi pada bidang ekonomi melahirkan negara-negara industri raksasa dan korporasi perdagangan raksasa, di sisi lain memarginalkan negara-negara miskin. Globalisasi dalam bidang politik mengakibatkan semakin berkurangnya kekuasaan negara karena perkembangan ekonomi dan budaya global. Globalisasi budaya menyebabkan dunia dewasa ini dalam keadaan kacau (*chaos*).

Paradoks lain yang dimunculkan oleh globalisasi adalah munculnya kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di sisi lain, kesenjangan itu juga terjadi di dalam negara-negara tersebut, yaitu antara masyarakat kaya dan miskin. Beruntung kita mempunyai kearifan dan kemauan politik untuk menjabarkan ideologi nasional ke dalam strategi, kebijakan pokok serta program-program pembangunan yang konkret. Selain itu, bahwa tentu saja ideologi nasional kita, Pancasila, adalah ideologi yang terbuka. Secara implisit, hal itu mencakup makna, bahwa ideologi nasional kita adalah ideologi yang demokratis. Komitmen, konsensus, kearifan dan kemauan politik hendaknya memberi refleksi dan aktualisasi, hidup nyata di tengah masyarakat, dihayati, dan memberikan motivasi sekaligus komitmen bersama, termasuk dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan zaman millennium ketiga, yang ditandai adanya perubahan lingkungan strategis global.

1. Globalisasi

McLuhan yang merupakan seorang pemikir komunikasi pada tahun 1964 telah melontarkan konsepnya mengenai *The Global Village*, namun konsep globalisasi baru masuk kajian dunia universitas pada tahun 80-an sebagai suatu pengertian sosiologi yang dicitakan oleh Roland Roberston dari University of Pittsburgh, meskipun secara umum globalisasi dianggap sebagai suatu pengertian ekonomi (Tilaar, 1997: 15).

Tabb (2001:10) mengatakan bahwa definisi globalisasi merupakan sebuah kategori luas yang mencakup banyak aspek dan makna. Selanjutnya dia mengatakan bahwa:

"Istilah tersebut berarti sebuah proses saling keterhubungan antar negara dan masyarakat. Ini adalah gambaran bagaimana kejadian dan kegiatan di satu bagian dunia memiliki akibat signifikan bagi masyarakat dan komunitas di bagian dunia lainnya.... Ini bukan saja soal ekonomi tapi bahkan meningkatnya saling ketergantungan sosial dan budaya dari desa global yang minum *Coke* dan menonton *Disney*".

Malcom Waters dalam bukunya *Globalization*, membuat beberapa kemungkinan mengenai proses mulainya globalisasi. Pertama, globalisasi muncul sejak manusia hidup di bumi ini; kedua, globalisasi lahir sejalan modernisasi yang dimulai dikenal peradaban Barat yang sejalan dengan perkembangan kapitalisme, ketika, globalisasi merupakan

fenomena baru yang berkaitan dengan pascaindustri, pascamodern atau disorganisasi kapitalisme. (Tilaar, 1997: 16).

Proses globalisasi mempengaruhi pada hampir keseluruhan arena kehidupan manusia. Tetapi pada umumnya meliputi arena ekonomi, politik, dan budaya. Pada arena ekonomi mempengaruhi dimensi perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar uang, dan pasar kerja. Pada arena politik mempengaruhi kedaulatan negara, fokus pemecahan masalah, organisasi internasional, hubungan internasional, dan politik budaya. Pada arena budaya mempengaruhi dimensi lanskap kepercayaan (*sacriscape*), lanskap etnik (*ethnoscape*), lanskap ekonomi (*econoscape*), dan lanskap persantiaian (*leisurescape*).

Pandangan Marxian menganggap arena ekonomiah yang menentukan, sedangkan pandangan Parsonian menganggap arena budaya yang menentukan, sedangkan arena lainnya mengikuti. Tabb (Tilaar, 2001:14) berpandangan bukan hanya pada arena itu saja yang dipengaruhi globalisasi melainkan baik atau buruk. Bagi mereka yang diuntungkan cenderung menyukainya dan tidak menghendaki campur tangan pemerintah. Sementara yang berfikir bahwa mereka dirugikan atau takut akan kehancuran dan mahalanya ongkos sosial globalisasi akan usaha penyebaran keuntungan secara lebih *fair*. Tabb mengatakan bahwa untuk menilai globalisasi, perlu dipertimbangkan norma-norma kultural yang dihasilkan oleh

proses globalisasi kontemporer. Masalah globalisasi bukan melulu eksploitasi atau pekerja dunia ketiga atau kerusakan lingkungan, tetapi juga proses de-humanisasi.

Globalisasi pada bidang ekonomi melahirkan negara-negara industri rak-sasa dan korporasi perdagangan rak-sasa, di sisi lain memarjinalkan negara-negara miskin. Globalisasi dalam bidang politik mengakibatkan semakin berkurangnya kekuasaan negara karena perkembangan ekonomi dan budaya global. Globalisasi budaya menyebabkan dunia dewasa ini dalam keadaan kacau (*chaos*).

Berkaitan dengan globalisasi terhadap konsep etnis dan bangsa ada hal yang menarik terjadi dalam proses tersebut, yang oleh Naisbitt (Tilaar, 2001) disebut sebagai paradoks, yang menimbulkan efek diferensiasi dan sekaligus homogenisasi. Efek diferensiasi terlihat pada runtuhnya negara Uni Soviet akibatnya munculnya sub budaya etnis (etnosentrisme). Negara yang dulunya terdiri dari pelbagai jenis etnis kini terurai ke dalam negara-negara kecil akibat munculnya nilai-nilai budaya etnis. Masalah semacam itu disadari benar oleh para *founding fathers* negara kita, sehingga memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai sub budaya yang dari bangsa Indonesia yang bhinneka (berbeda-beda) namun keseluruhannya diikat oleh satu cita-cita untuk menciptakan budaya nasional yang diterima sebagai puncak budaya etnis. Efek homogenisasi terjadi terutama karena

pengaruh komunikasi yang semakin intens. Televisi telah menjadikan dunia terasa sempit dan cita rasa manusia seolah diseragamkan. Tapi pada sisi lain pengaruh komunikasi juga menyebabkan negara-bangsa (*nation-state*) yang homogen berubah ke arah suatu multi-kulturalisme. Pusat kekuasaan bisa beralih ke pinggiran, sedangkan budaya yang dulunya di pinggiran (*periphery*) bisa berpindah ke pusat.

Paradoks lain yang dimunculkan oleh globalisasi adalah munculnya kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di sisi lain kesenjangan itu juga terjadi di dalam negara-negara tersebut, yaitu antara masyarakat kaya dan miskin. Kemiskinan menjadi masalah pokok yang harus diatasi oleh dunia, sebagaimana keputusan G-7 dalam pertemuan mereka di Lyon pada akhir Juni 1996 yang menyatakan bahwa:

"Globalization (global economy) is source of rising living standard reaping the gains from trade, international investment, and technological progress. For this purpose, developing countries should make adjustment to increased competition and special efforts to eliminate inequality".

2. Pengaruh Globalisasi

Globalisasi yang menimbulkan krisis multidimensional telah mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia berupa krisis identitas dalam diri

individu, kelompok dan masyarakat termasuk di dalamnya kader. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pembinaan kepribadian kader yang merupakan pemberdayaan diri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul akibat globalisasi. Kader partai harus mempunyai identitas diri yang kuat dan memiliki antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi. Heilbroner (Tilaar, 1997:34) menyatakan bahwa:

"masa depan atau esok hari hanya dapat dibayangkan dan tidak dapat dipastikan. Masa depan tidak dapat diramalkan. Manusia hanya dapat mengontrol secara efektif kekuatan-kekuatan yang membentuk masa depan pada hari ini. Dengan kata lain masa depan adalah masa kini yang diarahkan oleh manusia itu sendiri. Apabila manusia masa kini tidak mengenal kemungkinan-kemungkinan yang akan lahir serta kekuatan-kekuatan yang akan membawa kehidupan umat manusia di masa depan tidak dikenal maka manusia itu akan menderita akibat ketidaksadarannya itu.

Dengan kata lain manusia yang tidak mempunyai persepsi terhadap masa depannya akan dibawa oleh arus perubahan yang dahsyat yang membawanya ketempat yang tidak dikenalnya. Maka hasilnya sudah dapat dibaca, yaitu kehidupan di dalam ketidakpastian atau *chaos*".

Untuk membangun kepribadian kader dalam menghadapi problematika yang muncul akibat globalisasi se-

hingga tidak terjebak dalam arus perubahan yang menimbulkan ketidakpastian (*chaos*) maka diperlukan pemberdayaan yang bertujuan menjadikan kader sebagai warga dunia yang baik dan bertanggungjawab (*good and responsible citizenship*) yang menurut Rosada (2000:10) bertujuan :

"... untuk (a) membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, regional dan global ; (b) menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera dan demokratis; (c) menghasilkan mahasiswa yang berfikir komprehensif, analitis, kritis dan bertindak demokratis, yang ... akan menjadi warga bangsa yang mudah dipimpin tapi sulit dikendalikan, mudah diperintah tetapi sulit diperbudak; (d) mengembangkan kultur demokrasi yaitu kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan mengambil keputusan serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik kemasyarakatan; (e) mampu membentuk mahasiswa menjadi *good and responsible citizen* (warga negara yang baik dan bertanggung jawab) melalui penanaman moral dan keterampilan sosial (*social skills*) sehingga kelak akan mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kewarganegaraan seperti toleransi, perbedaan pendapat, bersikap empati, menghargai pluralitas, kesadaran

hukum dan tertib sosial, menjunjung tinggi HAM, mengembangkan demokrasi dalam berbagai lapangan kehidupan dan menghargai kearifan lokal (*local wisdom*). (Dede Rosyada et.al., 2000: 10).

3. Respon terhadap Globalisasi

Kenyataan globalisasi yang bersifat paradoks telah memunculkan perlawanan seperti tercermin dalam peristiwa 9/11. Di Eropa, pada dekade 1970-an, protes terhadap penindasan monopoli kelompok kiri. Namun setelah kelompok tersebut mulai melesap di era 1990-an, maka menurut Eric Hiariej jaringan yang tersisa adalah kelompok Islam Radikal. Hal tersebut tercermin pada seorang muallaf Prancis yang ikut perang Bosnia. Lionel Dumont yang mengatakan *"the muslims are the only ones to fight for the system"*. Atau seperti yang dikatakan Mohammad Zarif-mantan diplomat Taliban, yang mengatakan *"it is common knowledge that American Imperialism is the custodian of global capitalism..... the capitalist world selected the Americans as their watchdog on basis of their savageness in WW II"* (Kompas, 6 Agustus 2005).

Kegamangan menghadapi globalisasi yang seringkali berkonotasi pada kapitalisme dan imperialisme, bukan hanya monopoli kelompok kiri dan Islam radikal. Kelompok nasionalis, memiliki keprihatinan yang sama. Sukarno,

dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB, 30 September 1960, yang diberi judul *"Membangun Dunia Kembali"* (*To Build the World Anew*) mengatakan *"Nasib umat manusia tidak dapat lagi ditentukan oleh beberapa bangsa besar dan kuat". Bangsa-bangsa yang lebih muda, bangsa yang sedang ber-tunas, bangsa-bangsa yang lebih kecil pun berhak bersuara karena mempunyai tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan sehingga berhak untuk didengar karena mempunyai peranan di dunia ini dan harus memberikan sumbangannya.*

Imperialisme dan perjuangan untuk mempertahankannya, merupakan kejahatan yang terbesar di dunia kita ini. Indonesia berusaha membangun suatu dunia yang baru, yang lebih baik yang sehat dan aman, di mana terdapat suasana damai dengan keadilan dan kemakmuran untuk semua orang serta kemanusiaan dapat mencapai kejayaannya yang penuh (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi, 1961: 129-174).

Pidato Soekarno diperkuat dengan mengutip Al-Qur'an (S. 49: 13):

"Hai, sekalian manusia, sesungguhnya Aku telah menjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, sehingga kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu sekalian kenal-mengenal satu sama lain. Bahwasannya yang lebih mulia di antara kamu sekalian, ialah siapa yang lebih taqwa kepadaKu".

Tahun 1960-an ketika Soekarno menyampaikan pidatonya, dunia sedang dalam amcaman perang nuklir akibat perseteruan antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dari Blok Timur yang di pimpin Uni Soviet. Namun Soekarno menolak dikotomi tersebut dan menggalang kekuatan milyaran rakyat di Asia Afrika seraya mengatakan bahwa "semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita, dan jika cita-cita dan konsepsi itu menjadi usang, maka bangsa itu ada dalam bahaya".

Konsepsi yang diperlukan yang dimaksud Soekarno adalah Pancasila, yang dimaksudkannya sebagai alternatif dari *Declaration of Independence* dan Manifesto Komunis.

a. *Declaration of Independence*

Declaration of Independence yang ditulis oleh Thomas Jefferson dan kawan-kawan yang kemudian diadopsi oleh Kongres Kontinental ke-dua pada pertemuan di Philadelphia pada 4 Juli 1776, merupakan pernyataan kemerdekaan AS dari penjajahan Inggris. Deklarasi tersebut merupakan filosofi sosial politik yang isinya mengandung pemikiran bahwa ada hukum alam (*laws of nature*) yang menjadi standar tolak ukur dalam penyusunan hukum; semua manusia memiliki hak-hak alamiah yang melekat (*unalienable rights*); di antara hak-hak asasi manusia yang terpenting adalah kehidupan, kemerdekaan dan mengejar kebahagiaan (*Life, Liberty and pursuit of Happiness*) dan fungsi pemerintah adalah melindungi hak-hak tersebut. Pemerintah mendapatkan keku-

asaannya berdasarkan persetujuan yang diperintah yaitu rakyat dan tergantung pada kontrak sosial yang dibuat, dengan perjanjian bahwa pemerintah fungsinya sesuai dengan keinginan rakyat dan apabila pemerintah mengingkari fungsi utamanya dan tidak melindungi hak-hak rakyat dan tidak memberikan keamanan dan kebahagiaan (*Safety and Happiness*) serta melindungi dari kekuasaan despotis yang absolut, maka rakyat mempunyai hak atau kewajiban untuk melakukan revolusi menyingkirkan pemerintah tersebut dan menggantikannya dengan pengawal keamanan masa depan mereka yang baru (*Encyclopedia Americana* Vol. 8. 2001 : 592).

Deklarasi yang merupakan ekspresi pemikiran AS tersebut menjunjung hak-hak tingkat individu dalam kerangka Liberalisme. Liberalisme muncul akibat dari perkembangan di Eropa pada abad ke-17, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Voltaire, Montesquieu, Rousseau dan John Locke. Liberalisme dalam politik adalah doktrin bahwa undang-undang, hukum dan politik harus mendukung kebebasan individu berdasarkan keinginan rasional. Liberalisme berasumsi bahwa setiap individu adalah rasional, sehingga mempunyai hak untuk menggapai keinginan-keinginannya dengan menolak peran negara. Dalam ekonomi mereka dikauculkan dengan *laissez-faire*, suatu doktrin yang menentang aturan pemerintah di bidang bisnis. Kebebasan berbisnis yang tiada batas di dalam keterbatasan sumber daya dan alat pemuas, de-

ngan menjalankan pasar secara kompetitif, dan pengesahan kepemilikan hak pribadi serta penguatan kontrak. Faham *free enterprise* disebut juga sebagai *free private enterprise* dan individual enterprise. Secara teroretik, faham ini menghindari peran negara, namun perlindungan kepemilikan pribadi, penguatan kontrak dan pencegahan monopoli memerlukan peranan pemerintah. Ini semua bertentangan dengan gagasan Adam Smith dan para pengikutnya yang bereaksi terhadap campurtangan pemerintah dalam masalah ekonomi yang merupakan ciri abad ke-17 dan 18.

Pandangan bahwa individu selalu bertindak rasional tidak selamanya benar, faktanya banyak tindakan individu yang tidak rasional dan memerlukan peranan negara untuk merasionalkannya. Kebebasan berusaha tidak memberikan jaminan pemerataan distribusi dan pada gilirannya menimbulkan masalah ketertinggalan sebagian masyarakat dan hanya membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

b. Manifesto Komunis

Pada kutub yang lain adalah Manifesto Komunis yang merupakan penjabaran Marxisme sebagai doktrin sosial ekonomi dan program-program politiknya (Encyclopedia Americana 2001: 439). Manifesto tersebut ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada tahun 1847 dan dipublikasikan di London tahun berikutnya sebagai *Manifest der Kommunistischen Partei* atau *The*

c. Manifesto of Communist Party.

Manifesto terbagi dalam empat bab. Bab Pertama menjelaskan tatanan sosial di Eropa sejak peradaban perbudakan purba. Tatanan itu pada dasarnya berisi sistem dimana kelas penguasa memperoleh kekuatannya dari penguasaan alat-alat produksi. Penggunaan kekuasaan oleh kelas penguasa berakibat pada eksploitasi ekonomi dan pemaksaan politik terhadap rakyat. Perubahan kelas penguasa terjadi apabila ada penguasaan alat-alat produksi yang lebih besar lagi. Perjuangan kelas antara bangsawan feodal dan kapitalis akhir abad pertengahan nampak sebagai dinamika utama dari sejarah masa lalu. Ekonomi menjadi faktor utama perkembangan politik. Atas dasar itu maka ilmu pengetahuan dapat memahami dorongan sejarah dan konsepsi yang realistis dapat dibuat.

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa komunisme dapat dilaksanakan sebagai pranata sosial ekonomi dengan produktifitas yang tidak terbatas asalkan tidak ada kepemilikan perorangan pada alat produksi, suatu tatanan tanpa kelas, perjuangan kelas, eksploitasi dan penindasan. Ketika kepemilikan pribadi kapitalis dan persaingan menghambat pendekatan produksi secara kolektif, maka kelas pekerja akan menyatukan diri untuk mengeliminasi sistem kelas.

Pada Bab Kedua, berisi kelanjutan perkembangan gagasan dalam kerangka strategi politik, polemik ideologis, dan sikap psikologis. Bab Ketiga dicurahkan untuk mengkritik aliran-aliran so-

sialis atau komunis lainnya. Bab Keempat merupakan suatu komentar singkat tentang kelompok-kelompok politik pada masa itu.

Komunisme pada dasarnya adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan suatu teori atau sistem organisasi sosial yang berdasar atas pandangan bahwa semua kepemilikan adalah milik umum. Secara khusus komunisme dapat dikaitkan dengan doktrin yang mendorong gerakan revolusioner yang tujuannya adalah menghapuskan kapitalisme dan akhirnya mendirikan suatu masyarakat di mana barang-barang dimiliki bersama dan aktifitas ekonomi direncanakan dan dikontrol secara sosial, sedangkan pendistribusiannya sesuai dengan kapasitas individu maksimal yang diberikan dan sesuai kebutuhan masimalnya (*from each according to his capacity, to each according to his needs*). Komunisme dibedakan dengan sosialisme dari tujuannya, yang melalui metode demokratis dan konstitusional menasionalisasi secara gradual hanya terhadap alat-alat produksi yang esensial dan mengatur distribusi secara adil pada setiap orang sesuai besaran dan mutu pekerjaannya (*to each person for amount and quality of his or her work*).

Somerville (Encyclopedia Americana vol. 7, 2001:439) mengatakan bahwa beberapa gagasan manifesto yang dituangkan ke dalam platform partai hanya menarik sebagai kajian sejarah dan beberapa program politik yang disampaikan dalam manifesto

tersebut ketinggalan zaman. Dua puluh lima tahun kemudian Marx melihat perkembangan sistem demokrasi parlementer bahwa tujuan-tujuan buruh dapat dicapai melalui parlemen, bahkan untuk perubahan radikal sekalipun.

4. Ideologi Alternatif

Menyadari akan karakteristik gagasan dari Thomas Jefferson dan kawan-kawan serta Marx dan Engels tersebut, serta pertentangan di antara keduanya yang berujung pada ancaman akan terganggunya perdamaian dunia, maka upaya untuk menggali gagasan filosofis dan ideologis yang dapat mewakili milyaran manusia di seantero Asia Afrika menjadi relevan dan memiliki dasar epistemologis, ontologis dan axiologis.

Memasuki millenium ketiga, polarisasi Timur dan Barat berganti menjadi polarisasi kaya dan miskin, juga mungkin polarisasi Barat dan Islam seperti disinyalir Hutington. Dunia telah memasuki apa yang dinamakan seorang futurolog Toffler sebagai "Gelombang Ketiga" yang ditandai dengan masyarakat informasi, era informasi atau era *post industrial*. Era yang ditandai dengan munculnya internet pada tahun 1990-an ini sesungguhnya sudah dimulai sejak tiga dasa warsa sebelumnya.

Fukuyama menandai periode ini dengan berbagai kondisi sosial yang sangat butuh pada sebagian besar dunia industri. Kejahatan dan kekacauan

sosial mulai meningkat dan membuat wilayah-wilayah pusat kota dari masyarakat yang paling makmur di muka bumi hampir-hampir tidak dapat dihuni. Institusi sosial kekerabatan menurun tajam. Tingkat kesuburan di sebagian besar negara Eropa dan Jepang begitu rendah sehingga masyarakatnya akan mengalami depopulasi pada abad mendatang; perkawinan dan kelahiran yang semakin sedikit; perceraian meningkat dan anak yang lahir di luar nikah terjadi dalam satu dari tiga anak yang dilahirkan di AS dan lebih dari separo anak di Skandinavia. Akhirnya, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga mengalami penurunan. Sifat dan keterlibatan masyarakat satu dengan lainnya pun telah mengalami perubahan.

Perubahan-perubahan yang drastis terjadi secara bersamaan itu oleh Fukuyama dianggap sebagai penyebab munculnya *Great Disruption* (Kekacauan Besar) dalam nilai-nilai sosial yang berlaku pada masyarakat era industri di pertengahan abad ke-20.

5. Pancasila

Solusi gagasan apakah yang diberikan oleh Indonesia terhadap dunia dengan kekacauan besar semacam itu? Apa sajakah pokok-pokok pikiran dalam gagasan alternatif yang dinamakan Pancasila itu. Dalam forum Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960 Sukarno menyampaikan pokok-pokok pikirannya.

Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia meliputi orang-orang yang menganut berbagai macam agama, meskipun demikian 85% dari sembilan puluh juta rakyat beragama Islam. Berpangkal pada kenyataan inilah maka Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai yang paling utama dalam falsafah hidup bangsa. Tidak seorangpun yang menerima *Declaration of Independence*, begitu pula pengikut Manifesto Komunis dalam forum PBB menyangkal adanya Yang Maha Kuasa.

Kedua : Nasionalisme merupakan kekuatan yang membakar untuk mencapai kemerdekaan dan mempertahankan hidup selama masa perjuangan melawan penjajah bahkan setelah merdeka. Namun nasionalisme bukanlah Chauvinisme, yang menganggap bangsa sendiri lebih unggul dari bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia tidak memaksakan kehendak kepada bangsa-bangsa lain. Nasionalisme adalah gerakan pembebasan, suatu gerakan protes terhadap imperialisme dan kolonialisme. Inti sosial nasionalisme adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Oleh karena itu nasionalisme menolak imperialisme.

Ketiga: Internasionalisme. Antara nasionalisme dan internasionalisme tidak ada perselisihan dan pertentangan. Internasionalisme tidak dapat tumbuh dan berkembang selain di atas tanah subur nasionalisme. Itu dibuktikan dengan adanya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Internasionalis-

me bukanlah kosmopolitanisme yang merupakan penyangkalan terhadap nasionalisme.

Internasionalisme yang sejati adalah pernyataan dari nasionalisme yang sejati, dimana setiap bangsa menghargai hak-hak semua bangsa, baik yang besar maupun yang kecil, yang lama maupun yang baru. Internasionalisme merupakan suatu tanda bahwa suatu bangsa telah menjadi dewasa dan bertanggungjawab, telah meninggalkan sifat kekanak-kanakan mengenai rasa keunggulan nasional atau rasial.

Internasionalisme tidak mengizinkan PBB dijadikan sebagai forum untuk tujuan-tujuan nasional yang sempit, tujuan golongan atau tujuan mencari keuntungan maupun prestige nasional.

Keempat: Demokrasi bukanlah monopoli atau penemuan dari aturan sosial Barat. Demokrasi merupakan keadaan asli manusia, meskipun bersifat kondisional. Demokrasi mengandung tiga unsur pokok. Mufakat atau kebulatan pendapat, Perwakilan dan Musyawarah, sehingga tidak terdapat mayoritas maupun minoritas.

Kelima : Keadilan Sosial. Pada keadilan sosial dirangkaikan kemakmuran sosial, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hanya masyarakat yang makmur dapat merupakan masyarakat yang adil, meskipun kemakmuran itu sendiri bisa bersemayam dalam ketidakadilan sosial. Menerima prinsip keadilan sosial berarti menolak kolonialisme dan imperialisme. Ini berarti

usaha yang tegas dan terpadu untuk mengakhiri banyak dari kejahatan-kejahatan sosial yang menyusahkan dunia. Ada pengakuan praktis bahwa semua orang adalah saudara dan bahwa semua orang mempunyai tanggungjawab bersama.

a. Dimensi Moral

Rumusan Pancasila tersebut secara material memuat nilai-nilai dasar manusiawi, yaitu nilai yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, sesuai dengan kecenderungan manusia sebagai manusia (Wahana, 1993:73). Karena sifatnya tersebut Pancasila dapat dikatakan merupakan suatu *bonum honestum* (nilai yang patut dikejar dan dihormati karena dirinya sendiri), bukan yang sekedar *bonum utile* (nilai kegunaan) atau *bonum delectable* (nilai yang menyenangkan keinginan dan dapat dinikmati). Sebagai *bonum honestum*, Pancasila merupakan suatu nilai moral yang bersifat total, tidak seperti nilai-nilai yang bersifat partikular. Nilai moral menyampaikan suatu tuntunan kepada person sebagai totalitas, maka wajib untuk diberi prioritas diatas semua nilai partikular. Tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan nilai moral tersebut dapat disebut bernilai.

Moral (*morale*) berarti tata cara hidup, moral mengacu pada perilaku yang diharapkan. Menurut Liebert, esensi moral adalah *interpersonal relationship and transaction* (Djahiri, 1992: 6). Sedangkan menurut Piaget, *morality is attitude of respect for persons and*

for the ruler (Duska & Whelan, 1977:8). Pengertian lain diberikan oleh Bull (1963:3) yang mengatakan bahwa moral berkaitan dengan *"code of conduct in society"* dan *"the pursuit of the good life"*.

Otonomi Moral

Otonomi moral merupakan istilah yang dirumuskan Kant (Bagus, 2002: 766). Kant membedakan istilah otonomi dan heteronomi moral. Heteronomi moral berarti sikap moral di mana orang melaksanakan kewajiban bukan berdasarkan keinsafan tetapi berdasarkan rasa takut, tertekan, takut berdosa. Orang yang demikian hidup sesuai dengan tuntutan lingkungannya, bukan berdasarkan kesadaran, tetapi karena takut ditegur, dimarahi, takut berdosa. Sikap ini terwujud dalam hubungan dengan orang tua, dalam sikap terhadap seksualitas, dalam ketaatan terhadap tuntutan agama. Ini suatu penyimpangan dari sikap moral yang sebenarnya.

Pernyataan sikap moral yang sebenarnya ialah otonomi moral, yang berarti orang taat dan menjalankan kewajibannya karena ia sadar dan insyaf. Tetapi tidak berarti suatu sikap menu-tup diri. Dalam otonomi moral kita diminta untuk rendah hati menerima situasi masyarakat dan aturan-aturan yang ada di dalamnya.

Otonomi menempatkan inti moralitas dalam sikap batin. Otonomi moral yang mendasarkan pada otoritas individu untuk melakukan pertimbangan

dan tindakan moral telah menjadi alasan bagi adanya gerakan anti pendidikan moral (Chazan, 1985:9). Para pe-nganjur gerakan anti pendidikan moral mendasarkan argumennya pada beberapa alasan yang bersifat epistemologis karena pendidikan moral diasumsikan sebagai spekulatif tidak ilmiah, tidak alamiah (*"assumes that moral education is wrong because of the speculative, non scientific, non agreed upon nature of the contents it comes on the young"*); individualis karena asumsi bahwa manusia adalah unik (*"he assumptions is that there is a unique human sphere"*); sosialis karena pendidikan moral biasanya diajarkan di sekolah borjuis (*"a criticism of moral education as generally practiced in contemporary bourgeois schools"*); empirikal evaluatif (*"that moral education... is simply not attainable in schools"*) dan struktural karena sekolah dianggap manipulatif (*"that schools, by the very nature of their nature, have been proven to institutions of manipulations and imposition"*). Berbeda dengan pandangan-pandangan tersebut Durkheim justru menambahkan elemen moral dengan aspek disiplin yaitu *"regularity of the conduct and authority"* dan berpandangan bahwa *"morality begins with membership of a group; it is not related to an act which has individual interest (alone)"*.

Abdulgani (1964:62) memaknai Moral Pancasila dalam arti kata normatif yakni faktor yang mengharuskan manusia dalam tingkah laku kita sehari-

hari, baik sebagai pemegang kekuasaan, maupun sebagai rakyat biasa. Dengan moral Pancasila manusia selalu bersedia mempertanggungjawabkan tingkah laku dan sikap tindakan tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa; selalu menempuh cara-cara perikemanusiaan dan mengutamakan jalan musyawarah dan mufakat; dan selalu memusatkan daya-upaya kepada terlaksananya kebahagiaan dan keadilan di bidang rohani dan jasmani, untuk kebesaran dan kejayaan jiwa Bangsa Indonesia. Peneliti berpendapat bahwa Moral Pancasila sebagaimana diungkapkan Abdulgani, secara psikologis dapat dikategorikan sebagai sumber perilaku altruistik dalam pengembangan kepribadian. Staub (1978) mengartikan altruisme sebagai *"an act that is intended solely in benefit to another person or group and which provides no material benefit to person who commits it"*. Perilaku altruistik hanya mungkin muncul dari suatu proses pembiasaan melalui pembelajaran budaya (*cultural-learning*). Mussen dan Eisenberg-Berg (1977) mengatakan bahwa yang diwarisi manusia adalah potensi atau kemungkinan mempelajari berbagai perilaku sosial. Tapi apa yang benar-benar dipelajari tergantung pada situasi sosial.

Perilaku altruistik dan penyesuaian sosial merupakan produk dari *social learning* dan bukan merupakan evolusi biologis. Evolusi sosial berdasar pada mekanisme psikologis dan sosial, bukan pada faktor genetik (Phares, 1984:

558). Mengapa manusia dapat mengembangkan suatu moralitas altruistik, dijawab secara berbeda-beda oleh para ahli. Pandangan yang dinamis dari psikoanalisa, mengatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Piaget berpandangan bahwa penilaian moral sebagai pengejawantahan kematangan proses perkembangan kognitif.

Nyaris berpandangan sama, Kohlberg percaya bahwa penilaian moral seseorang muncul melalui beberapa tahap universal pada semua kebudayaan. Pemahaman perkembangan moral dalam konteks psikologis demikian nampaknya belum menjadi acuan sehingga proses penyadaran akan perlunya disiplin tersandera pada tata tertib yang artifisial. Sebagai contoh pada sebuah penyelenggaraan diklat sebelum pemilu 2004 kepada peserta dilakukan uji air kemih untuk mendeteksi adanya siswa yang menggunakan narkoba melalui Tes Urine yang diselenggarakan sebuah laboratorium kesehatan. Pada saat itu memang gencar sekali media massa memberitakan mengenai para anggota lembaga legislatif yang terjerumus sebagai pengguna narkoba dan perilaku menyimpang lainnya.

Kebutuhan akan disiplin terutama bagi para pejabat maupun politisi sangatlah mendesak karena seperti dikatakan Padmadinata bahwa di atas demokrasi yang diperlukan Indonesia saat ini adalah disiplin. Disiplin yang dimaksudkannya adalah disiplin diri termasuk

etika politik di dalamnya, terutama bagi kalangan elite. Selanjutnya dikatakan bahwa bukan hanya dari negarawan saja dituntut adanya rasa tanggungjawab publik melainkan juga dari para politisi. Kegagalan untuk berperilaku etis ini menyebabkan reformasi menjadi deformasi (PR, 27 Januari 2007).

Pembentukan disiplin melalui pendidikan moral haruslah dilakukan melalui proses pembiasaan (*habituasi*). Pendidikan melalui kebiasaan merupakan salah satu metode yang dianjurkan Quthb (Sistem Pendidikan Islam, 1988: 363).

Metodologi pembiasaan tentunya memerlukan waktu yang lama untuk ditanamkan pada pribadi seseorang. Kaderisasi yang hanya beberapa hari tentunya tidak dapat secara optimal menginternalisasikan nilai-nilai pada diri seseorang. Apalagi siswa adalah orang-orang dewasa yang telah memiliki nilai yang melekat pada dirinya. Kursus kader dengan demikian hanya mampu untuk mengingatkan pada siswa tentang nilai falsafah, ideologi maupun moral yang sesuai dengan kepribadian sebagai kader dan menunjukkan nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan kepribadian seorang kader. Pendidikan instan semacam ini dikritik oleh Rendra (2000: 41), tetapi tidak ada yang salah dengan indoktrinasi karena bagi Durkheim pendidikan adalah indoktrinasi. Menurut al-Ghazali dalam Ihya Ullumudin (Hawa, 2004: 23) jiwa muda dapat diindoktrinasi. Masalahnya adalah bagaimana

indoktrinasi tersebut dapat menyadarkan jiwa agar manusia yang memiliki hati yang sudah membatu atau membeku sehingga nilai-nilai apapun yang diberikan mantul, berubah menjadi hati yang rindu pada Kebenaran (Dahlan, 1993:55).

b. Ideologis

Selain sebagai nilai moral, Pancasila merupakan suatu ideologi (*science of ideas* atau *weltaanschaung*) yang dapat bersifat dogmatik. Ideologi merupakan sistem pemikiran yang bersifat *power oriented*, *totalitarianism oriented*, *dogmatism oriented* dan *establishment oriented*. Sebagai ideologi yang dapat diterima semua orang, berarti Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Sebagai ideologi Pancasila memiliki dimensi-dimensi: (a) Realitas: yaitu pemahaman situasi sosial yang sedang dihadapi sebagai masa lampau; (b) idealisme: yaitu usaha memberi gambaran situasi sosial baru yang ingin diciptakan; (c) fleksibilitas: yaitu penyusunan program umum yang kondisional dan situasional yang menggariskan langkah-langkah untuk mencapai situasi yang baru yang dikehendakinya (Wahana 1993:86).

Epistemologi Ideologi

Untuk memahami perkembangan ideologi kebangsaan (*nasionalisme*) perlu kiranya dilakukan kajian filosofis untuk memahami posisinya dalam kehidupan berbangsa dan pengaruhnya terhadap pengembangan kepribadian nasional kader.

Secara epistemologis, sejarah perkembangan filsafat pada periode modern (1500-1800) dibagi dalam tiga babak (Pranarka, 1987:161): masa modern awal yakni masa antara Descartes sampai Kant; modern tengahan atau zaman aufklarung (*the enlightenment*) yakni masa antara Immanuel Kant sampai Hegel dan zaman modern akhir yakni zaman idealisme dan positivisme. Masa aufklarung atau pencerahan itulah yang dikenal dengan *the age of ideology*. Patriotisme, nasionalisme, liberalisme dan sosialisme merupakan ideologi-ideologi yang dominan.

Ideologi muncul karena wawasan gerakan aufklarung yang bercita-cita mengubah masyarakat, menguasai dunia dan membangun dunia. Wawasan itulah yang mengubah fungsi ilmu dari statis eksplikatif untuk mengetahui menjadi dinamik pragmatik, yaitu untuk mengubah, menguasai dan membangun. Jadi tujuan ilmu adalah mengubah masyarakat Selain itu ilmu tumbuh semakin majemuk terutama yang berkenaan dengan pandangan-pandangan mengenai manusia, dunia, masyarakat, moral, politik, Negara dan hukum. Hal itu mendorong tumbuhnya keinginan membangun *science of ideas*, yaitu ilmu yang memuat pandangan-pandangan dari aliran-aliran pemikiran besar yang ada.

Seperti halnya ilmu pengetahuan yang terus berkembang, ideologi sebagai ilmu mengenai gagasan-gagasan pun terus berkembang mengikuti pandangan manusia terhadap kehidupan

dan permasalahannya yang memerlukan jawaban. Ideologi-ideologi cenderung untuk memberikan jawaban terhadap masalah-masalah mendasar seperti misalnya arah sejarah dan kebudayaan. Pada sisi lain ideologi mengemukakan dalil-dalil normatif untuk membangun dan menata dunia, masyarakat, sejarah dan kebudayaan. Perkembangan ideologi yang mengacu pada esensi bahwa ideologi adalah kekuatan menumbuhkan pemikiran-pemikiran ideologikal seperti nampak pada facisme dan nasional-sosialisme (Nazi). Suasana seperti itulah yang menciptakan iklim yang menegangkan sehingga memicu terjadinya Perang Dunia I dan II.

Perkembangan ideologi seperti itulah yang membuat nasionalisme atau faham kebangsaan dicurigai di Indonesia. Soekarno, Hatta dan the *founding fathers* lainnya harus bersusah payah menjelaskan dan mengembangkan nasionalisme. Faham nasionalisme menghadapi kritik dari faham keagamaan. Dialektika antara kedua faham itu dapat ditelusuri dari perdebatan Soekarno dengan Hasan (Persis), Soekarno dengan Agus Salim dan Soekarno dengan Natsir. Kendatipun pergulatan wacana filosofis antara ideologi nasionalisme, keagamaan dan determinasi ekonomi (sosialisme) telah bertemu dalam *common platform* Pancasila, akan tetapi tidak berarti bahwa pergulatan pada tataran pemikiran ideologik sudah berhenti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy. 2001. *Sukarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ali, Abdullah Yusuf. 1994. *The Holy Qur-an Text and Translation*. Kuala Lumpur : Islamic Book Trust.
- Ali, Mukti. 1971. *Etika Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional dan Pemberantasan Kemaksiatan dari Segi Agama Islam*. Yogyakarta: Yayasan Nida.
- Allport, Gordon W. 1937. *Personality: A Psychological Interpretation*. New York : Holt.
- Badiklatpus. (2002). *Materi Pengajaran Guru Kader*. Jakarta: Badiklatpus.
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bayer, Patricia, et al (ed.). 2004. *The Encyclopedia Americana International Edition*. Danbury, Connecticut: Grolier.
- Bachrun. 1994. *Pola Pendidikan Moral di Sekolah*. Tesis Master pada PPs IKIP Bandung: tidak diterbitkan .
- Budiardjo, Miriam. 1981. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.
- Chazan, Barry. 1985. *Contemporary Approaches to Moral Education*. New York: Teachers College Press.
- Departemen Penerangan RI. (1964). *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Departemen Pertahanan dan Keamanan RI. (2007). *Buletin Litbang Hankam*. [Online]. Tersedia : buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp. [23 Januari 2008]
- Dewantara, Ki Hajar. 1967. *Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa
- Djahiri, A.Kosasih. 1990. *Menuju Guru Inkuiri Yang Reaktif*. Bandung : Laboratorium Pengajaran PMP UPI.
- Durkheim, Emile. 1956. *Education and Sociology*. -- : The Free Press.
- Driyarkara, N. 1959. *Pancasila dan Religi dalam Seminar Pancasila ke-1*. Jakarta: Panitia Seminar Pancasila.
- Eatwell, Roger dan Wright, Anthony (ed.). 2004. *Ideologi Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela.
- Hatta, Mohammad. 1981. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Hawwa, Sa'id. 2004. *Mensucikan Jiwa Intisari Ihya' Ullumuddin al Ghazali . . . Konsep Tajkiyatun Nafs*. Jakarta : Rabbani Press.
- Huntington, Samuel P. 1999. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta : Qalam.

- Ishak, Joesoef (ed.). 2001. *100 Tahun Bung Karno*. Jakarta : Hasta Mitra
- Kagan, Jerome. (1971). *Personality Development*. New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Kartono, Kartini. 1980. *Teori Kepribadian*. Bandung : Alumni.
- Kohlberg, L. 1984. *Essay in Moral Development, The Psychology of Moral Development* Vol. 2. New York: Harper & Crow.
- Kohlberg, Laurence. 1995. *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta : Kanisius.
- Mas'ood, Mohtar. 2004. *Etnisitas & Politik dalam Seminar di Sinology Center, UMY*
- Moodod, Tariq. 1990. *Islam and Racism : Does Islam Have Something to Teach the West*. [Online]. atheisme.about.com/b/a/266255.html. (23 Januari 2008).
- NPR. 2007. *Exploring America's National Identity*. [Online]. Tersedia : www.npr.org/templates/story.php. [23 Januari 2008].
- Pranarka, A.W.M. 1987. *Epistemologi Dasar*. Jakarta : Yayasan Proklamasi dan CSIS.
- Quthb, Muhammad. 1998. *Sistem Pendidikan Islam*. Bandung : PT Alma' arif.
- Rendra. 2000. *Rakyat Belum Merdeka Sebuah Paradigma Budaya*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Rex, John. 1996. *Contemporary Nationalism, Its Causes and Caonsequences for Europe*. [Online]. Tersedia : www.socresonline.org.uk/1/1/4/rex.html [23 Januari 2008]
- Rogers, Dorothy. 1982. *Life-Span Human Development*. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Rosyada, Dede. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenada Media dan ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Soekarno. 2000. *Membangun Dunia Baru (To Build The World Anew)*. Pidato di Muka Sidang Umum PBB ke XV. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Soekarno. 2001. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta : PT Toko Buku Gunung Agung Tbk.
- Sujanto, Agus et. Al. (ed). 1984. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta : Aksara Baru.
- Suprijanto, H. 2007. *Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Stiglitz, Joseph. 2002. *Globalization and Its Discontents*. London: Penguin Books.
- Tabb, William K. (2003. *Tabir Politik Globalisasi*. Yogyakarta : Lafadl.
- Tilaar, H.A.R. 1997. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Grasindo.
- _____. 2007. *Profil Ulil Abshar-Abdalla*. [Online]. Tersedia : freedominstute.org/id/index.php. [23 Januari 2008].